

EFEK MODERASI *GOOD GOVERNANCE* MENINGKATKAN KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PANGKEP

Nurmiati

Universitas Patria Artha

Jl. Tun Abdul Razak Poros Makassar-Gowa

nurmiati@patria-artha.ac.id

Abstract: *The purpose of this study is to analyze the effects of moderation good governance in improving financial management performance with independent variable competence of human resources with information technology. This research is a research using quantitative approach. The type of data in this study is quantitative data consisting of primary data and secondary data. The population in this study are employees at the regional secretariat, the office of regional finance and the regional revenue office of Pangkep regency which amounted to 95 people. The result of the research shows that the effect of moderation of good governance can improve the performance of financial management with independent variable of human resource competence with information technology, although if directly both competency variable of human resource and information technology does not significantly influence to improvement of financial management performance of regency government of Pangkep.*

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efek moderasi *good governance* dalam peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dengan variabel independen kompetensi sumber daya manusia dengan teknologi informasi. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Jenis data dalam penelitian ini berupa data kuantitatif yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai pada Sekretariat Daerah, Dinas Pengelola Keuangan Daerah dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkep yang berjumlah 95 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efek moderasi *good governance* mampu meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dengan variabel independen kompetensi sumber daya manusia dan teknologi informasi, walaupun jika secara langsung baik variabel kompetensi sumber daya manusia maupun teknologi informasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah pemerintah Kabupaten Pangkep.

Kata Kunci: *Good Governance*, Kinerja Keuangan, Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi.

PENDAHULUAN

Di era reformasi pengelolaan keuangan daerah sudah mengalami berbagai perubahan regulasi dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut merupakan rangkaian bagaimana suatu pemerintah daerah dapat menciptakan *good governance* dengan melakukan tata kelola pemerintahan dengan baik. Keberhasilan dari suatu pembangunan di daerah tidak terlepas dari aspek pengelolaan keuangan daerah

yang dikelola dengan manajemen yang baik pula. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Menurut Yusuf (2010:1) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada *stakeholder* yang didalamnya mencakup berbagai macam pekerjaan yang membutuhkan keuangan termasuk komponen aset yang tercermin dalam neraca daerah dimana setiap tahun dibuatkan laporannya setelah pelaksanaan anggaran. Dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah di era otonomi daerah yaitu terkait dengan pengelolaan APBD perlu ditetapkan standar atau acuan kapan suatu daerah dikatakan mandiri, efektif dan efisien, dan akuntabel. Untuk itu diperlukan suatu pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai tolak ukur. Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial maupun non finansial (Ihyaul, 2012:20). Berikut disajikan data target dan realisasi anggaran tahun 2011-2015 pada tabel berikut:

Tabel 1: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Kabupaten Pangkep

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Keterangan
2011	713,170,545,986	723,945,311,593	101.51	Sangat Efektif
2012	737,042,378,969	747,261,807,070	101.39	Sangat Efektif
2013	887,053,848,552	913,802,938,297	103.02	Sangat Efektif
2014	1,051,222,614,469	1,025,589,186,074	97.56	Efektif
2015	1,255,323,437,265	1,241,169,936,014	98.87	Efektif
Rata-Rata			100.47	Sangat Efektif

Sumber: data diolah, APBD Kab. Pangkep, 2017

Tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata realisasi anggaran pemerintah daerah kabupaten Pangkep selama 5 tahun terakhir 100,47%, hal ini menunjukkan kinerja yang baik, namun selama 2 tahun terakhir pencapaian realisasi anggaran mengalami penurunan di bawah 100%. Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Pangkep tidak dapat dilepaskan dari cukup tidaknya kemampuan daerah dalam bidang keuangan, baik buruknya kondisi keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pangkep berhubungan dengan bagaimana pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya. Fakta menunjukkan bahwa implementasi *good governance* yang belum optimal di bidang keuangan menyebabkan kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pangkep masih perlu ditingkatkan.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Indrawati (2012) yang menyatakan bahwa implementasi prinsip *good financial governance* dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan

negara akan mampu menciptakan *good governance* dan penelitian lain juga dilakukan oleh Todorovic (2013) bahwa melalui penerapan *good corporate governance* akan menghasilkan kinerja keuangan yang baik. Demikian pula penelitian yang dilakukan oleh Fadilah (2013) bahwa implementasi *good governance* berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan organisasi, namun berbeda dengan Makki dan Lodhi (2014) menunjukkan bahwa *good corporate governance* berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan.

Dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah dan implementasi *good governance* di Kabupaten Pangkep, maka terdapat beberapa faktor yang harus diperhatikan antara lain kompetensi sumber daya manusia. Penelitian yang dilakukan oleh Abbas (2013) menyatakan bahwa kompetensi manajerial berpengaruh positif terhadap tata kelola dan kinerja keuangan dan penelitian Mamogale (2014) menyatakan bahwa sumber daya manusia mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kinerja keuangan namun berbeda dengan hasil penelitian Suwanda (2015) yang menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Selain kompetensi sumber daya manusia faktor lain yang mempengaruhi implementasi *good governance* dan kinerja pengelolaan keuangan daerah adalah pemanfaatan teknologi informasi. Zulaikha dan Lestari (2007) menyatakan teknologi informasi dapat dijadikan sebagai mekanisme koordinasi *lintas unit* dan berpengaruh terhadap proses yang ada dalam organisasi. Dengan penggunaan teknologi diharapkan koordinasi antar unit dalam organisasi dapat berjalan dengan cepat dan tepat sehingga kinerja organisasi secara umum dapat meningkat.

Hal ini sejalan penelitian yang dilakukan oleh Ringin *et al.* (2015) yang menyatakan bahwa kapabilitas teknologi informasi mempunyai hubungan yang signifikan dengan kinerja organisasi serta penelitian Rahman dan Zulkifli (2016) yang menunjukkan bahwa penggunaan sistem teknologi informasi membawa dampak positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berbeda dengan hasil penelitian Suwanda (2015) yang menyatakan bahwa teknologi informasi berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Keberhasilan organisasi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dalam hal ini pemerintah Kabupaten Pangkep tidak terlepas dari kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi pada setiap SKPD yang memberikan pengaruh dalam implementasi *good governance* dan peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah dengan *good governance* sebagai variabel moderasi dan untuk menganalisis pengaruh teknologi informasi terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah dengan *good governance* sebagai variabel moderasi.

TINJAUAN TEORETIS

Teori Keagenan

Teori keagenan (*agency theory*) awalnya dikemukakan oleh Berle dan Means (1932) yang dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976) yaitu adanya hubungan

kerja antara pihak yang memberi wewenang (*principal*) dengan pihak yang menerima wewenang (*agent*) dalam bentuk kontrak kerja (*nexus of contract*) yang telah disepakati. Mardiasmo (2004:20) menjelaskan bahwa akuntabilitas publik sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu: 1) pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi (akuntabilitas vertikal), dan 2) pertanggungjawaban kepada masyarakat luas (akuntabilitas horizontal). Berkaitan dengan masalah keagenan dalam organisasi sektor publik merupakan suatu konsep yang didasari oleh teori keagenan.

Teori Stakeholder

Freeman (1984:25) mendefinisikan *stakeholder* sebagai *any group or individual who can affect be affected by the achievement of an organization's objective*. *Stakeholder* merupakan kelompok maupun individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh proses pencapaian tujuan organisasi. *Stakeholder theory* merupakan sekelompok orang, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap organisasi. Organisasi sektor publik memiliki cakupan yang lebih luas dan lebih beragam. Bryson (2001:57) mendefinisikan *stakeholder* ialah suatu individu, kelompok atau organisasi apapun yang dapat melakukan klaim terhadap sumber daya atau hasil dari organisasi atau dipengaruhi oleh hasil itu. Keberhasilan dalam organisasi publik maupun swasta adalah sejauhmana organisasi tersebut dapat menjamin kepuasan *stakeholder* utama (masyarakat sebagai *stakeholder* utama).

Kompetensi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan elemen utama suatu organisasi dibandingkan dengan elemen lainnya seperti modal, teknologi, dan uang, sebab manusia itu sendiri yang mengendalikan yang lain. Menurut Alwi (2008:217), sumber daya manusia adalah sebagai kunci keunggulan kompetitif bagi organisasi. Membentuk kompetensi baik secara individu atau kelompok guna memenuhi kebutuhan organisasi dan mengintegrasikan kompetensi-kompetensi tersebut dalam sistem manajemen yang dijalankan organisasi. Kualitas dan karakteristik pegawai yang diperlukan oleh organisasi pada hakikatnya tidak terlepas dari tantangan-tantangan bersaing yang akan dihadapi oleh organisasi sekarang maupun di masa yang akan datang.

Dalam instansi pemerintahan, untuk menghasilkan kinerja pengelolaan keuangan yang efektif dan LKPD yang berkualitas dibutuhkan sumber daya manusia yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintahan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 pasal 3, menyebutkan bahwa kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki PNS, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Penilaian terhadap pencapaian kompetensi perlu dilakukan secara objektif, berdasarkan kinerja para karyawan yang ada di dalam organisasi, dengan

bukti penguasaan mereka terhadap pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap sebagai hasil belajar (Sutrisno, 2009:223). Pandangan tentang kompetensi juga dikemukakan oleh Cushway (2011) yang memperkenalkan teori kemampuan (*ability theory*) bahwa kompetensi ideal jika ditunjang oleh motif yang kuat, sifat talenta yang dominan, mengembangkan konsep diri, memiliki pengetahuan yang luas dan terampil dengan keahliannya.

Teknologi Informasi

Teknologi informasi meliputi komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software, database*), jaringan (*internet, intranet, electronic commerce*), dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson, 2000:25). Perkembangan teknologi informasi tidak hanya dimanfaatkan pada organisasi bisnis tetapi juga pada organisasi sektor publik, termasuk pemerintahan. Dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan, dan menyalurkan informasi keuangan kepada pelayanan publik.

Good Governance

Good governance diartikan sebagai tata kelola yang baik pada suatu usaha yang dilandasi oleh etika profesional dalam berusaha/berkarya. *Good governance* merupakan wujud dari penerimaan akan pentingnya suatu perangkat peraturan atau tata kelola yang baik untuk mengatur hubungan, fungsi, dan kepentingan berbagai pihak dalam urusan bisnis maupun pelayanan publik. Teori prinsip tata kelola (*governance principle theory*) yang dikemukakan oleh Arthur (2010:155) yang menyatakan bahwa tata kelola organisasi dibangun atas dasar 9 (Sembilan) prinsip untuk mencapai tujuan. Kesembilan prinsip tersebut adalah partisipasi, penegakan hukum, transparansi, responsibilitas, konsensus, persamaan hak, efektivitas, dan efisiensi dan akuntabilitas.

Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

Halim (2004:16) menyatakan bahwa salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan menganalisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Penggunaan rasio keuangan dalam mengukur kinerja pengelolaan keuangan yang bersumber dari APBD pada dasarnya adalah untuk memudahkan memahami makna yang terkandung dalam APBD tersebut, bagaimana hubungan antara satu pos dengan pos yang lainnya yang ada di dalam APBD. Hubungan yang terjadi dapat menjelaskan kinerja pemerintah daerah terutama kinerja pengelolaan keuangan daerah. Kinerja pengelolaan keuangan daerah mencakup bagaimana bagaimana pemerintah memperoleh pendapatan dan pemerintah daerah mengalokasikan dana yang dimiliki untuk belanja daerah.

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 1 ayat 8 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah sebagai berikut “keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah”. Menurut Halim (2004:24) kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Bentuk dari penilaian kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur laporan pertanggungjawaban kepala daerah berupa perhitungan APBD.

Good Governance Memoderasi Hubungan antara Kompetensi Sumber Daya Manusia dengan Kinerja Pengelolaan Keuangan

Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi pemerintah daerah, memerlukan sumber daya manusia dalam hal ini pegawai pengelola keuangan yang memiliki kompetensi yang baik untuk mengembangkan organisasi tempatnya bekerja melalui implementasi *good governance* sehingga mampu meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan. Penelitian Abbas (2013) menyatakan bahwa ada pengaruh positif kompetensi sumber daya manusia dan kinerja keuangan, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi kompetensi sumber daya manusia, maka kinerja keuangan akan semakin meningkat melalui tata kelola yang baik (*good governance*).

H₁: *Good governance* memoderasi hubungan antara kompetensi sumber daya manusia dengan kinerja pengelolaan keuangan.

Good Governance Memoderasi Hubungan antara Teknologi Informasi dengan Kinerja Pengelolaan Keuangan

Optimalisasi pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dengan jalan membangun jaringan sistem informasi dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja sehingga menunjang penerapan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) karena itu tata kelola menjadi penting dalam suatu organisasi khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan sumber daya dan aset organisasi. Penelitian Rahman dan Zulkifli (2016) yang menunjukkan bahwa penggunaan sistem teknologi informasi membawa dampak positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang didukung tata kelola yang baik (*good governance*)

H₂: *Good governance* memoderasi hubungan antara teknologi informasi dengan kinerja pengelolaan keuangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menguji hipotesis (*hypotesis testing*) untuk melihat korelasi

yang terjadi antara kompetensi sumber daya manusia dan teknologi informasi terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah dengan *good governance* sebagai variabel moderasi. Pengumpulan data yang dibutuhkan guna mendukung penelitian ini menggunakan metode survei kuesioner. Kuesioner penelitian ini diserahkan langsung kepada responden Selain kuisisioner dilakukan juga wawancara adalah teknik tanya jawab langsung kepada sejumlah responden untuk memperkuat data hasil penelitian melalui kuisisioner.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pengelola keuangan yang di setiap SKPD pemerintah daerah Kabupaten Pangkep yang berjumlah 95 orang yang terbagi kedalam 3 SKPD yaitu Sekretariat Daerah, Dinas Pengelola Keuangan Daerah dan Dinas Pendapatan Daerah. Metode penarikan sampel dalam penelitian ini adalah metode sensus atau seluruh populasi dijadikan sebagai sampel. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif dan analisis inferensial dengan menggunakan *Partial Least Square (PLS)*. Persamaan struktural yang akan dicari dan diuji koefisiennya adalah sebagai berikut:

$$Y = \gamma_{11}X_1 + \gamma_{12}X_2 + \zeta \text{ (M Rendah)}$$
$$Y = \gamma_{21}X_1 + \gamma_{22}X_2 + \zeta \text{ (M Tinggi)}$$

Keterangan:

X1 : Kompetensi sumber daya manusia

X2 : Teknologi informasi

M : *Good governance*

Y : Kinerja pengelolaan keuangan

γ (Gama) : Koefisien pengaruh hubungan antar variabel

ζ (Zeta) : Galat model

Kompetensi sumber daya manusia (X1): Kemampuan yang dimiliki oleh pegawai pada pemerintah daerah Kabupaten Pangkep dalam melaksanakan pekerjaannya di bidang keuangan (Spencer & Spencer, 1993). Indikator: motif, faktor bawaan, konsep diri, pengetahuan, dan keterampilan (diukur dengan skala *likert*).

Teknologi informasi (X2) adalah penggunaan suatu sistem aplikasi yang dapat mendukung penyusunan laporan keuangan secara tepat waktu, lengkap, akurat, dan dapat diandalkan sesuai ketentuan yang berlaku (Widjayanto, 2001). Indikator: perangkat keras, perangkat lunak, manajemen data dan jaringan (diukur dengan skala *likert*).

Good governance (M) adalah penerapan prinsip-prinsip *good governance* di bidang pengelolaan keuangan (UNDP, 2000). Indikator: partisipasi, penegakan hukum, transparansi, responsibilitas, konsensus, keadilan, efektivitas dan efisien, akuntabilitas serta visi strategi (diukur dengan skala *likert*).

Kinerja pengelolaan keuangan daerah (Y) adalah pencapaian hasil kerja di bidang keuangan yang berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah (Halim, 2004). Indikator: kemandirian keuangan daerah, ketergantungan keuangan daerah, derajat desentralisasi fiskal dan kapasitas fiskal (diukur dengan skala *likert*).

PEMBAHASAN

Profil Responden

Responden dalam penelitian ini adalah pegawai pengelola keuangan pada pemerintah Kabupaten Pangkep sebanyak 95 orang. Sebanyak 95 responden tersebut ditunjukkan profilnya pada tabel berikut ini.

Tabel 1: Profil Responden

No	Karakteristik Responden	Total	
		Jumlah	Persentase (%)
1	Jenis Kelamin		
	Perempuan	45	47
	Laki-Laki	50	53
2	Usia		
	20 - 29	1	1
	30 - 39	39	41
	40 - 49	35	37
	≥ 50	20	21
3	Tingkat Pendidikan		
	SMA	19	20
	Diploma	6	6
	S1	56	59
	S2	14	15

Sumber: hasil olah data SPSS, 2017

Data responden menunjukkan jumlah responden laki-laki lebih banyak daripada jumlah responden perempuan. Jumlah laki-laki yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 50 orang atau 53% dari total responden, sedangkan perempuan sebanyak 45 orang atau 47% dari total responden. Responden berumur 20-29 tahun sebanyak 1 orang atau 1%, berumur 30-39 tahun sebanyak 39 orang atau 41%, berumur 40-49 tahun sebanyak 35 orang atau 37%, berumur samadengan dan di atas 50 tahun sebanyak 20 orang atau 21%. Data ini menunjukkan sebagian besar jabatan struktural diduduki oleh pejabat eselon yang berumur produktif yaitu berumur 40-49 tahun. Responden dengan pendidikan SMA sebanyak 19 orang atau 20% kemudian diploma sebanyak 6 orang atau 6% lalu S1 sebanyak 56 orang atau sekitar 59% dan S2 sebanyak 14 orang atau sekitar 15%. Dengan mayoritas pendidikan pegawai adalah sarjana (S-1) maka kemampuan responden dapat dijadikan modal oleh Pemerintah Kabupaten Pangkep untuk mencapai kinerja dan tujuan organisasi yang ingin dicapai, dan diharapkan pegawai dapat mengerti serta menjalankan tugas-tugas yang diterima selain juga tuntutan organisasi sebagai pengelola keuangan daerah.

Deskriptif Variabel

Deskriptif variabel ditunjukkan pada tabel 2 berikut ini. Variabel kompetensi sumber daya manusia memiliki nilai rata-rata sebesar 4.04. Hal ini menunjukkan

bahwa sebagian besar responden menjawab baik untuk pertanyaan yang berkaitan dengan kompetensi sumber daya manusia. Nilai minimum variabel kompetensi sumber daya manusia adalah sebesar 1,80 yang artinya adalah terdapat responden yang menjawab tidak baik. Sementara itu nilai maksimum variabel kompetensi sumber daya manusia adalah sebesar 5 yang menunjukkan bahwa terdapat responden yang menjawab sangat baik untuk pertanyaan yang berkaitan dengan kompetensi sumber daya manusia.

Variabel teknologi informasi memiliki nilai rata-rata sebesar 3,99. Hal Ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menjawab baik untuk pertanyaan yang berkaitan dengan teknologi informasi. Nilai minimum variabel teknologi informasi adalah sebesar 1,75 yang menunjukkan bahwa terdapat responden yang menjawab tidak baik untuk pertanyaan yang berkaitan dengan teknologi informasi. Sementara itu, nilai maksimum adalah sebesar 5 yang menunjukkan bahwa terdapat responden yang menjawab sangat baik untuk pertanyaan yang berkaitan dengan teknologi informasi.

Tabel 2: Deskriptif Variabel

		Statistics			
		Sumber Daya Manusia	Teknologi Informasi	Good Governance	Kinerja Keuangan
N	Valid	95	95	95	95
	Missing	0	0	0	0
Mean		4.0463	3.9974	4.0527	4.0658
Median		4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
Std. Deviation		.44478	.47615	.48144	.48407
Minimum		1.80	1.75	1.56	1.75
Maximum		5.00	5.00	5.00	5.00

Sumber: hasil olah data SPSS, 2017

Variabel *good governance* memiliki nilai rata-rata sebesar 4,05. Hal Ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menjawab baik untuk pertanyaan yang berkaitan dengan *good governance*. Nilai minimum variabel *good governance* adalah sebesar 1,56 yang menunjukkan bahwa terdapat responden yang menjawab tidak baik untuk pertanyaan yang berkaitan dengan *good governance*. Sementara itu, nilai maksimum adalah sebesar 5 yang menunjukkan bahwa terdapat responden yang menjawab sangat baik untuk pertanyaan yang berkaitan dengan *good governance*.

Variabel kinerja pengelolaan keuangan memiliki nilai rata-rata sebesar 4,05. Hal Ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menjawab baik untuk pertanyaan yang berkaitan dengan kinerja pengelolaan keuangan. Nilai minimum variabel kinerja pengelolaan keuangan adalah sebesar 1,75 yang menunjukkan bahwa terdapat responden yang menjawab tidak baik untuk pertanyaan yang berkaitan dengan kinerja pengelolaan keuangan. Sementara itu, nilai maksimum

adalah sebesar 5 yang menunjukkan bahwa terdapat responden yang menjawab sangat baik untuk pertanyaan yang berkaitan dengan kinerja pengelolaan keuangan.

Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis melalui estimasi koefisien pada *path* (β) yang kemudian dinilai signifikansinya berdasarkan nilai t-statistik tiap-tiap *path*. Nilai koefisien *path* atau *inner model* menunjukkan tingkat signifikansi dalam pengujian hipotesis. Nilai koefisien *path* atau *inner model* yang ditunjukkan oleh nilai t-statistik, harus diatas 1,64 untuk hipotesis *one-tailed*. (Hartono dan Abdillah, 2009:58). Signifikansi model prediksi dalam pengujian struktur model dapat dilihat dari nilai t-statistik antara variabel independen terhadap variabel dependen dapat dilihat dalam tabel 3 uji hipotesis di bawah ini:

Tabel 3: Uji Hipotesis

Hipotesis	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)
Kompetensi sumber daya manusia terhadap kinerja pengelolaan keuangan melalui <i>good governance</i>	0.182	0.162	0.096	1.892
Kompetensi sumber daya manusia terhadap kinerja pengelolaan keuangan melalui <i>good governance</i>	0.175	0.161	0.096	1.828

Sumber: hasil olah data PLS 3.0, 2017

Hipotesis 1 menyatakan bahwa *good governance* memoderasi hubungan antara kompetensi sumber daya manusia dengan kinerja pengelolaan keuangan. Output parameter uji signifikansi dapat dilihat pada tabel *total effect* pada pengujian efek moderasi *good governance* terhadap hubungan antara kompetensi sumber daya manusia dengan kinerja pengelolaan keuangan, tidak terdapat pada tabel koefisien, karena pada efek moderasi tidak hanya dilakukan pengujian efek langsung (*direct effect*) variabel independen ke variabel dependen, tetapi juga hubungan interaksi antara variabel independen dan variabel moderasi terhadap variabel dependen (*indirect effect*). *Total effect* digunakan untuk melihat efek total prediksi (*direct* dan *indirect effect*). Berdasarkan hasil iterasi *bootstrapping* diperoleh nilai t-statistik variabel moderasi 1,892 lebih besar dari t-tabel 1,64, yang berarti bahwa *good governance* memoderasi hubungan antara kompetensi sumber daya manusia dengan kinerja pengelolaan keuangan, sehingga hipotesis untuk efek moderasi signifikan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa *good governance* berpengaruh positif dan signifikan sebesar 0,182 dalam keterkaitan hubungan antara kompetensi sumber daya manusia dalam upaya meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan.

Hal ini berarti, *good governance* memoderasi kompetensi sumber daya manusia terhadap kinerja pengelolaan keuangan sehingga hipotesis 1 untuk efek moderasi diterima. Semakin tinggi tingkat kesesuaian antara kompetensi sumber

daya manusia dengan penerapan *good governance*, maka semakin tinggi kinerja pengelolaan keuangan. Variabel *good governance* dalam model penelitian dikatakan sebagai variabel mediasi, artinya walaupun kompetensi sumber daya manusia berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah, namun *good governance* berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan. Kompetensi sumber daya manusia secara langsung tidak memberikan pengaruh nyata namun secara tidak langsung dapat memberikan pengaruh yang nyata terhadap peningkatan kinerja pengelolaan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa *good governance* merupakan variabel mediasi yang baik.

Hal ini sejalan dengan teori kinerja yang maksimal (*maximalization performance theory*) dari Kreitner dan Angelo (2008:49) bahwa kompetensi dan tata kelola yang baik menunjang tercapainya kinerja yang maksimal. Ini berarti setiap organisasi berupaya untuk mengelola aktivitas kerjanya melalui orang-orang yang memiliki kompetensi sesuai dengan motif, faktor bawaan, konsep diri, pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya untuk menjalankan prinsip *good governance* dalam mewujudkan kinerja pengelolaan yang optimal melalui perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan. Relevansi teori ini mendukung pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kinerja pengelolaan keuangan melalui *good governance*.

Pembahasan yang dikemukakan di atas relevan dengan konsep manajemen Islam yang mengkaji arti penting kompetensi sumber daya manusia sesuai dengan yang dikemukakan dalam al-Qur'an surah al-Isra ayat 84 yang terjemahnya:

Katakanlah (Muhammad), setiap orang harus bekerja sesuai dengan keahliannya. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Pada ayat ini memberikan pencerahan bahwa setiap orang dituntut untuk bekerja sesuai keahliannya.

Ayat al-Qur'an tersebut relevan dengan Hadis Nabi Muhammad SAW yang bersabda yang artinya: *Jika suatu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya* (HR. Bukhari). Hadis ini menegaskan bahwa penempatan seseorang harus sesuai kompetensi bidang kerja atau dengan kata lain *the right man on the right place*, agar para pegawai pengelola keuangan mampu mewujudkan *good governance*. Hadis ini memberikan pencerahan pada pemerintah daerah Kabupaten Pangkep untuk memilih dan menempatkan orang-orang yang berkompetensi sesuai bidang kerjanya dalam rangka mewujudkan *good governance* dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Abbas (2013:33) dengan rekomendasi bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap tata kelola dan kinerja keuangan yang memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya terletak pada variabel eksogen kompetensi yang diteliti terhadap variabel endogen tata kelola (*good governance*). Persamaan lainnya yaitu hasil penelitian berpengaruh positif dan signifikan. Perbedaannya terletak pada objek penelitian, dimana penelitian terdahulu objek penelitian adalah perusahaan swasta sedangkan penelitian ini objeknya adalah pemerintah daerah.

Hipotesis 2 menyatakan bahwa *good governance* memoderasi hubungan antara teknologi informasi dengan kinerja pengelolaan keuangan. Berdasarkan tabel 3, hasil iterasi *bootstrapping* diperoleh nilai t-statistik variabel moderasi 1,828 lebih besar dari t-tabel 1,64, yang berarti bahwa *good governance* memoderasi hubungan antara teknologi informasi dengan kinerja pengelolaan keuangan sehingga hipotesis untuk efek moderasi signifikan. Jadi, disimpulkan bahwa *good governance* berpengaruh positif dan signifikan sebesar 0,175 dalam keterkaitan hubungan antara teknologi informasi dalam upaya meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan. Hal ini berarti, *good governance* memoderasi teknologi informasi terhadap kinerja pengelolaan keuangan sehingga hipotesis 2 untuk efek moderasi diterima. Semakin tinggi tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dengan penerapan *good governance*, maka semakin tinggi kinerja pengelolaan keuangan.

Variabel *good governance* dalam model penelitian dikatakan sebagai variabel mediasi, artinya walaupun teknologi informasi berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah, namun *good governance* berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan, sehingga dapat dikatakan bahwa teknologi informasi secara langsung tidak memberikan pengaruh nyata namun secara tidak langsung dapat memberikan pengaruh yang nyata terhadap peningkatan kinerja pengelolaan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa *good governance* merupakan variabel mediasi yang baik.

Teori yang mendukung hasil penelitian ini adalah teori pemanfaatan teknologi informasi yang dikemukakan oleh Widjayanto (2001:89) bahwa teknologi informasi berperan dalam menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para pengambil keputusan di dalam organisasi termasuk dalam hal pelaporan, sehingga mendukung proses pengambilan keputusan dengan lebih efektif. Teori ini memiliki relevansi dengan pembahasan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berfungsi untuk menghasilkan laporan keuangan dan informasi keuangan secara tepat waktu, lengkap, akurat, dan dapat diandalkan sesuai ketentuan yang berlaku serta mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Penelitian ini berbeda dengan penelitian Wigrantoro (2003) dengan rekomendasi bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak mendukung tata laksana pemerintahan yang baik (*good governance*.) Pemanfaatan teknologi informasi hanya digunakan untuk memudahkan pekerjaan di bidang pengelolaan keuangan. Perbedaannya terletak pada hasil penelitian penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak mendukung tata laksana pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemanfaatan teknologi informasi hanya digunakan untuk memudahkan pekerjaan di bidang pengelolaan keuangan. Persamaan lainnya terletak pada objek penelitian yaitu instansi pemerintahan. Sedangkan perbedaan yaitu penelitian terdahulu menggunakan analisis deskriptif kualitatif sedangkan penelitian ini menggunakan SEM.

Pembahasan yang dikemukakan di atas relevan dengan konsep manajemen Islam sesuai dengan yang dikemukakan dalam al-Qur'an surah Al-Mulk yang terjemahnya: "Dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatup sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahan di (udara) selain Yang Maha Pemurah Dia Maha Melihat Segala Sesuatu". Ayat ini

mempunyai keterkaitan dengan pembahasan mengenai pengaruh teknologi informasi terhadap kinerja pengelolaan keuangan melalui *good governance*. Ayat ini memberikan pencerahan bahwa sesungguhnya ada banyak hal yang bisa dikembangkan manusia melalui akal pikirannya yang merupakan manifestasi dari pemanfaatan teknologi informasi dalam hal ini komputer dan perangkat lainnya. Ayat al-Qur'an ini relevan dengan Hadis Nabi Muhammad SAW yang bersabda yang artinya: "Suara ini akan menyebar keseluruh dunia dan setiap bangsa akan mendengarnya dalam bahasanya masing-masing". Hadis ini menegaskan bahwa pada zaman dahulu, ratusan tahun yang lalu, komunikasi di antara benua memakan waktu berminggu-minggu. Sementara itu, sekarang hanya perlu beberapa detik dengan internet dan satelit yang dilengkapi dengan teknologi komunikasi modern untuk menyampaikan suatu informasi.

PENUTUP

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara *good governance* dengan kinerja pengelolaan keuangan. *Good governance* berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan. Semakin baik *good governance* maka kinerja pengelolaan keuangan akan semakin meningkat. *Good governance* sebagai variabel moderasi antara hubungan kompetensi sumber daya manusia dengan kinerja pengelolaan keuangan menunjukkan adanya pengaruh.

Penelitian ini juga menemukan bahwa *Good governance* sebagai variabel moderasi antara hubungan teknologi informasi dengan kinerja pengelolaan keuangan menunjukkan adanya pengaruh. Dengan demikian, *good governance* adalah variabel moderasi yang baik karena mampu memediasi antara kompetensi sumber daya manusia dan teknologi informasi dengan kinerja pengelolaan keuangan menjadi signifikan.

Hasil penelitian ini mengharapkan agar seluruh pegawai terus mengembangkan kompetensinya secara terencana dan berkesinambungan sehingga mampu menciptakan *good governance*. Selanjutnya, berdampak pada peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Hal ini mendorong terwujudnya *good governance* sehingga berdampak pada peningkatan kinerja pengelolaan keuangan.

Keterbatasan penelitian ini berfokus pada pegawai pengelolaan keuangan di SKPD pemerintah daerah Kabupaten Pangkep, sehingga kesimpulan yang diperoleh melalui hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan, mengingat setiap pemerintah daerah memiliki sumber daya manusia, teknologi informasi, implementasi *good governance*, dan pengelolaan keuangan yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Iu. 2013. Affected of Financial Management and Auditor Competence toward Corporate, Satisfaction and financial Performance. *Journal of Business Research*.
Alwi, S. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Kedua, BPFE, Yogyakarta.

- Arthur, J. K. 2010. *Manajemen Keuangan, Prinsip dan Penerapan*. PT. Indeks, Jakarta.
- Cushway, B. 2011. *Human Resources Management*. PT Gramedia, Jakarta.
- Fadilah, S. 2013. The Influence of Good Governance Implementation to Organization Performance. *The International Journal of Social Sciences*, 7(1):33.
- Freeman, R. E. 1984. *Strategic Management: A Stakeholder Approach*, Pitman, Boston.
- Ghozali, I. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi Keempat, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Halim, A. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*, Edisi Revisi. UPP AMP YPKN, Yogyakarta.
- Hartono, J. dan W. Abdillah. 2009. *Konsep Dan Aplikasi PLS (Partial Least Square) Untuk Penelitian Empiris*. BPFE-UGM, Yogyakarta.
- Indrawati, 2012. Prinsip Good Financial Governance dalam Pengelolaan Keuangan Negara dalam Rangka Mewujudkan Clean Governance. *Jurnal Perspektif*, 19 (12): 201-211.
- Kreitner, R. dan A. Kinicki, 2008. *Organizational Behavior*. 8th Edition. MCGraw-Hill, Boston.
- Mamogale, M. J. 2014. Financial Performance of Local Government in Limpopo Province. *African Studies Quarterly* 5 (1): 71-92.
- Mardiasmo, 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi, Yogyakarta.
- Martin. 2002. *Competence System*. Prentice Hall Inc, New Jersey.
- Makki, M. A. M. dan S. A. Lodhi. 2014. .Impact of Corporate Governance on Intellectual Capital Efficiency and Financial Performance. *Pakistan Journal of Commerce and Social Science* 8 (2):305-330.
- Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil. (online). (<http://www.djpk.depkeu.go.id/> diakses Mei 2017).
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. (Online). (<http://www.kemendagri.go.id/> diakses Mei 2017).
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. (Online). (<http://www.kemendagri.go.id/> diakses Mei 2017).
- Rahman, A. dan F. Zulkifli. 2016. Region's Financial Accounting Information System and The Quality of Local Government Financial Reports. *International Journal Of Information Management and Bussiness Review* 8 (4):64-68.
- Ringin, K. J., M. R. Razalli, dan N. Hasnan. 2015. The Relationship between Information Technology Capability and Organizational Performance in Nigerian Banks. *International Journal Of Bussiness Research and Development* 4 (2): 1-10.
- Sutrisno, E. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Kencana, Jakarta.
- Suwanda, D. 2015. Factor Effecting Quality of Local Government Financial Statement to Get Unqualified Opinion (WTP) of Audit Board of The Republic of Indonesia (BPK). *Research Journal of Finance and Accounting* 6 (4):139-157.

Nurmiati, Efek Moderasi Good Governance dalam Peningkatan Kinerja...

- Todorovic, I. 2013. Impact of Corporate Governance on Performance of Companies. *Montenegring Journal Of Economic* 9 (2): 47-53.
- Ulum, I. 2012. *Audit Sektor Publik Suatu Pengantar*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Wilkinson, J. W. 2000. *Accounting Information System: Essential Concepts and Applications*. Fourth Edition. Jhon Wiley and Sons, Inc.
- Widjajanto, N. 2001. *Sistem Informasi Akuntansi*. Erlangga, Jakarta.
- Wigrantoro, 2003. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Penerapan *Good Governance*. Makalah Seminar Universitas Gunadarma, Jakarta.
- Yusuf, M. 2010, *Langkah Pengelolaan Aset Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik*. Salemba Empat, Jakarta.
- Zulaikha dan Lestari. 2007. Pengaruh *Information Technology Relatedness* Terhadap Kinerja Perusahaan dengan *Knowledge Management Capability* sebagai variabel Intervening (Kajian Empiris Pada Perusahaan Perbankan di Jawa Tengah). *Prosiding*. Simposium Nasional Akuntansi X, Makassar.

Ucapan Terima Kasih:

Ucapan terima kasih kepada Kemenristekdikti, khususnya kepada Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang telah membiayai kegiatan penelitian ini.